

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada prinsipnya memberikan gambaran suatu masyarakat yang mengalami perubahan secara keseluruhannya baik dalam sosial budaya dan secara berkelompok yang ada di dalam masyarakat itu sendiri melalui proses transformasi dinamis dan terus-menerus dalam ketercapaian suatu situasi kehidupan yang membaik, yang mengarah pada kemakmuran serta kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah. Sumber Daya Manusia adalah subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan (Muliza dkk, 2017).

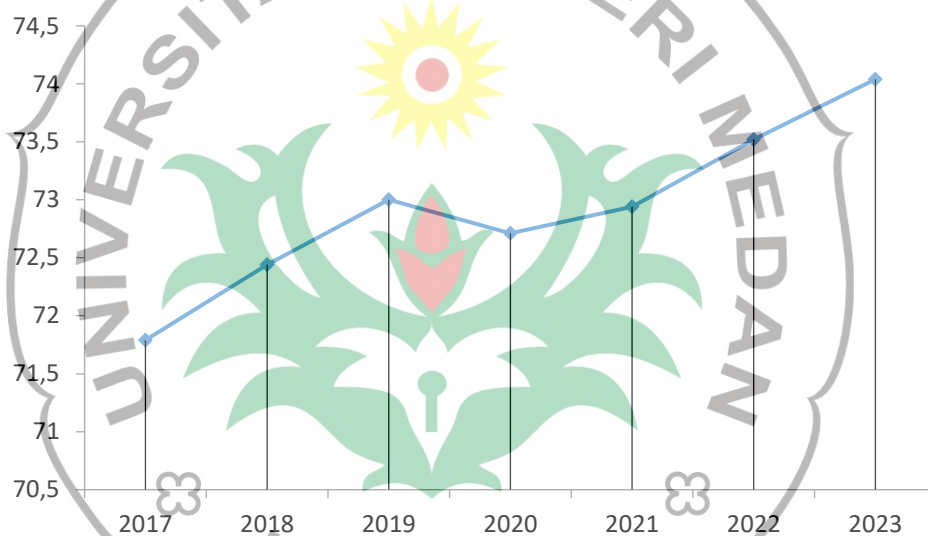
Model pembangunan yang dikembangkan saat ini salah satunya pembangunan manusia, Pembangunan manusia mencakup segala macam isu yang terjadi dalam masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik, atau dari nilai kultural dari sudut pandang manusia. Secara konseptual, pembangunan manusia diusung oleh United Nations Development Program (UNDP) dan mengusung acuan yang lebih urgensi dalam melihat ukuran yang akan dicapai yang diamati berdasarkan kualitas manusia di suatu negara (Mirza,2012). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipakai untuk parameter pengukuran keberhasilan kualitas hidup manusia. IPM dapat diartikan bagaimana masyarakat mendapatkan hasil

pembangunan baik dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll (BPS, 2020).

Menurut (Merang Kahang dkk,2016:3) Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan, namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Provinsi Riau ialah salah satu provinsi yang terletak dibagian tengah pulau Sumatera. Provinsi Riau beribukota Pekanbaru dengan luas wilayah sejauh 89.935,90 km². Berlandaskan data tahun 2022 penduduk Riau berjumlah 6.735.329 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 143,86 jiwa/km. Riau memiliki potensi di beberapa bidang yang salah satu hasil perkebunan daerah paling besar ialah kelapa sawit dan karet. Selain itu potensi yang dimiliki oleh Provinsi Riau adalah dibidang pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan. Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan perekonomian.

Dengan potensi dan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, nyatanya provinsi Riau memiliki nilai IPM yang berkategori tinggi yaitu dengan skor 72. Bila divisualisasikan dalam bentuk grafik IPM di provinsi Riau tahun 2023 ialah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat pada setiap tahunnya di provinsi Riau berada pada nilai IPM yang lebih dari 70 (>70). Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa di provinsi Riau tergolong sedang. Data tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2023 dengan nilai 74,04 sedangkan tahun 2020 menjadi tahun penurunan yang paling rendah dengan nilai 72,71. Sekalipun demikian, nilai ini sudah tergolong dalam kategori IPM menengah atas, yang dimaksud adalah dengan tingkat pembangunan manusia yang sudah cukup pesat dan baik.

Dalam pengukurannya, Angka IPM yang mendekati angka 100 dalam suatu kabupaten/kota dapat dinilai baik pada tingkat pembangunan manusianya, namun sebaliknya jika suatu wilayah memiliki angka IPM yang mendekati atau sama dengan nol maka dapat dikatakan pembangunan pada wilayah buruk. 4 Kategori angka IPM tersebut dapat dilihat apabila nilai IPM lebih dari 80 maka termasuk dalam status pembangunan tinggi, nilai IPM 69-70 maka termasuk dalam status pembangunan menengah atas, nilai IPM 50-69 termasuk menengah bawah, dan IPM kurang dari 50 termasuk pembangunan rendah (BPS, 2023)

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau dalam kurun waktu periode 2019-2023 terjadi fluktuasi disetiap kabupaten seperti yang ditampilkan pada grafik berikut ini :



Gambar 1.1 Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, 2024

Pada Gambar 1.2 dapat kita lihat pada tahun terakhir IPM pada Provinsi Riau masih terdapat kabupaten/kota yang berada pada nilai IPM yang kurang dari 70 (<70) dan terindikasi pada IPM golongan sedang. Data tahun 2023 menunjukkan Kota Pekanbaru menjadi daerah tertinggi Indeks Pembangunan Manusia nya dengan nilai 82,38 sedangkan yang paling rendah ialah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai 67,28. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tergolong sedang hingga rendah menjadi indikasi bahwa kualitas manusia di suatu daerah belum bisa dikatakan baik. HDI menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini untuk mengkategorikan apakah suatu negara ialah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang (UNDP, 1990).

Kesenjangan antara kota dengan IPM tertinggi di Riau dan yang terendah kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor pembentuk IPM yakni laju pertumbuhan ekonomi, dalam dunia pendidikan dari segi rata-rata lama sekolah, pengangguran, dan standar hidup yang layak. Untuk kota Pekanbaru jumlah fasilitas pendidikan dirasa lebih banyak sehingga lebih mudah dijangkau aksesnya serta untuk pengalokasian anggaran kegiatan pembangunan berbanding terbalik dengan Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten yang baru mengalami pemekaran sekitar 13 tahun lalu masih sulit dalam mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunannya.

Di Sisi lain pertumbuhan ekonomi memengaruhi pendapatan masyarakat yang kemudian memengaruhi pengeluaran perkapita. Pengaruh

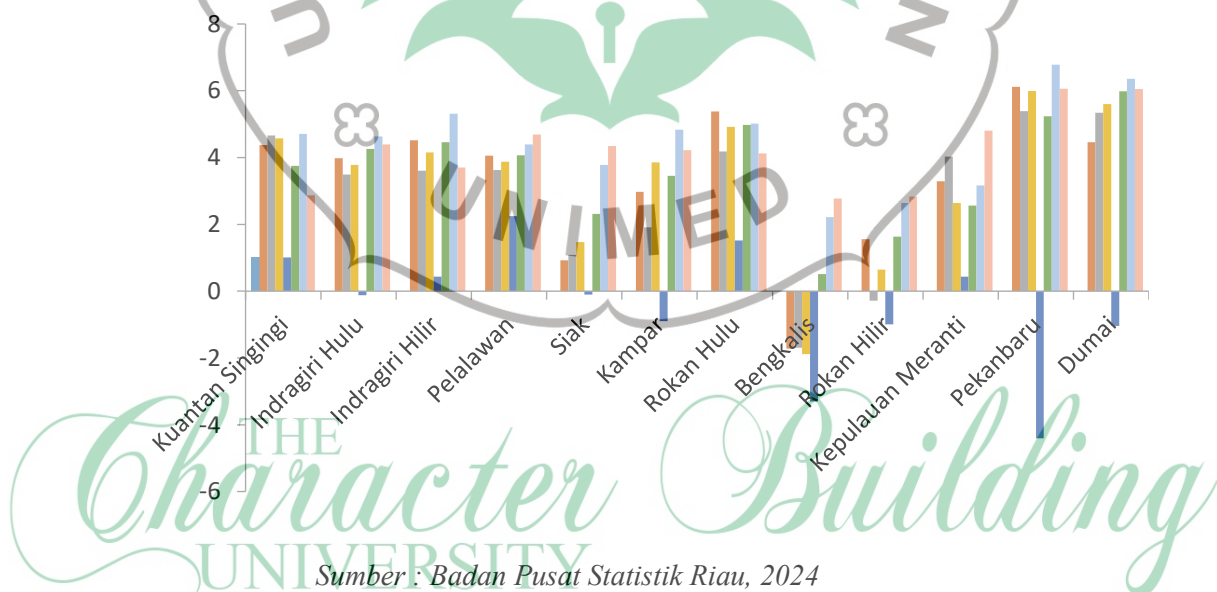
dari pengeluaran perkapita ini memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Menurut (Kuznets dalam Pardede) disebutkan bahwa salah satu ciri dari pertumbuhan ekonomi modern ialah output perkapita yang tinggi. Besarnya pertumbuhan output berakibat pada berubahnya pola konsumsi masyarakat, dalam artian bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan mendorong output perkapita dan merubah pola konsumsi dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. (Kuznets, dalam Pardede).

Menurut Ranis (2014), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung pada peningkatan pembangunan manusia dari peningkatan pendapatan. Pendapatan yang meningkat akan mendorong pengeluaran rumah tangga untuk makanan yang bergizi serta pendidikan dan kesehatan khususnya pada rumah tangga yang miskin. Terdapat dua alasan yang mendasari pembangunan manusia perlu mendapat perhatian.

Pertama, banyak negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Kedua, sumber daya manusia sebagai input dalam proses pertumbuhan ekonomi, jika pembangunan manusia berhasil maka kualitas sumber daya manusia semakin baik sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Ginting dkk, 2008).

Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki produktivitas tinggi sehingga mampu meningkatkan efisien kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan hasil kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam satu wilayah, yang mana apabila terjadi *Tred-Off* pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab terjadinya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 1985). Laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota pada Provinsi Riau pada tahun 2023 ditunjukkan pada grafik 1.3 berikut :



Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Berdasarkan gambar diatas, laju pertumbuhan ekonomi pada setiap kab kota memiliki beberapa perbedaan. Terdapat 3 daerah yang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi terendah, yakni Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami penurunan dari tahun 2022

sebesar 3,99 persen menjadi 1,98 persen pada tahun 2023. Hal ini juga terjadi pada Kuantan Singingi yang mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 3,57 persen menjadi 1,76 pada tahun 2023. Begitupula dengan Rokan Hulu yang mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 3,47 menjadi 2,62 persen pada tahun 2023.

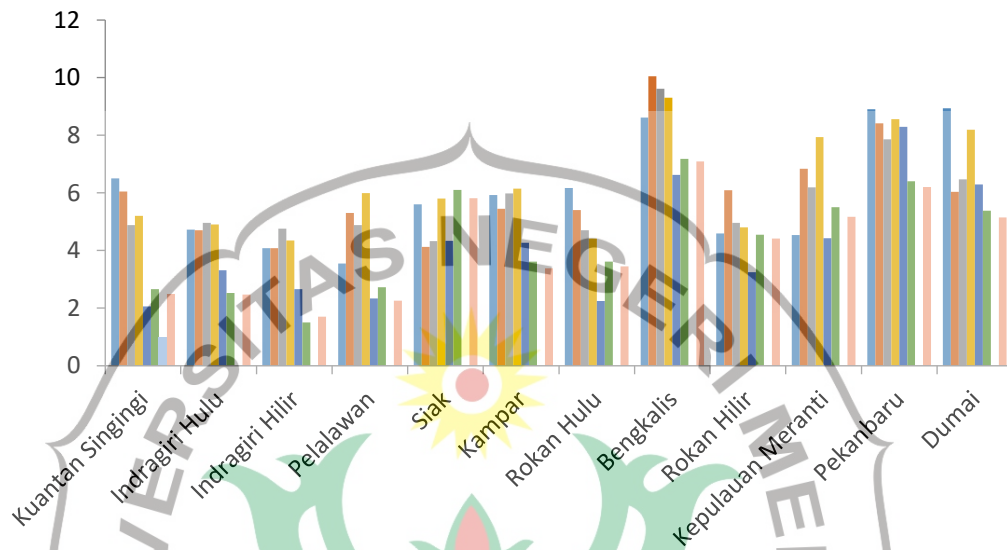
Berdasarkan teori Kuznets yang mengatakan bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan mendorong output perkapita dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Namun, pada ketiga Kabupaten/kota tersebut tidak terjadi demikian. Bahkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia tersebut masing-masing mengalami peningkatan yang cukup baik, kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,37 menjadi 67,98 persen, Kuantan Singingi sebesar 71,09 menjadi 71,67 persen, dan Rokan Hulu sebesar 70,31 menjadi 71,02. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh meningkatkan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Selain dari sisi pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang juga dapat mempengaruhi IPM adalah pengangguran.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan itu adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi yang diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Kedua, Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga akan meningkatkan produktifitasnya. Cara kedua ini tidak lagi memerlukan jumlah kuantitas jumlah tenaga kerja. Hal inilah yang menyebabkan tingginya pengangguran yang tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan teori tersebut. Sehingga besarnya jumlah pengangguran dapat mengurangi kesempatan individu untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, yang berdampak negatif pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Kurangnya investasi dalam modal manusia ini dapat menurunkan komponen pendidikan dan standar hidup dalam IPM. (Todaro,2000)

Tingkat pengangguran terbuka, yang mengukur persentase angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun tidak dapat menemukannya, mempunyai dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dapat menyebabkan rendahnya pembangunan manusia karena hal ini menandakan kurangnya kesempatan kerja dan pendapatan bagi individu, yang pada gilirannya mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya penting lainnya untuk pembangunan (Istiandari et al., 2020).



Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, 2024

Berdasarkan grafik diatas, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau mengalami fluktuasi pada periode 2023. Dimana terdapat tiga daerah yang termasuk dalam kategori daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi yakni Bengkalis sebesar 7,09 persen, Pekanbaru sebesar 6,20 persen, dan Siak sebesar 5,82 persen. Namun, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka diatas rata-rata 6 persen. Termasuk Kota Pekanbaru yang mana tergolong pada daerah sibuk dengan berbagai jenis kegiatan produktivitas ekonomi baik industri maupun bisnis, namun memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Menurut teori human capital, pengangguran yang tinggi akan berpengaruh negatif hingga mempengaruhi penurunan komponen Indeks Pembangunan Manusia.

Namun, berdasarkan data yang ada, ketiga Kabupaten/kota tersebut yang memiliki IPM tertinggi setiap tahunnya. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengangguran tinggi akan menurunkan indeks pembangunan manusia.

Selain laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, salah satu dimensi yang berhubungan dengan IPM adalah Pendidikan. Pendidikan secara konsisten diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Berinvestasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu namun juga berkontribusi terhadap produktivitas dan daya saing suatu bangsa secara keseluruhan.

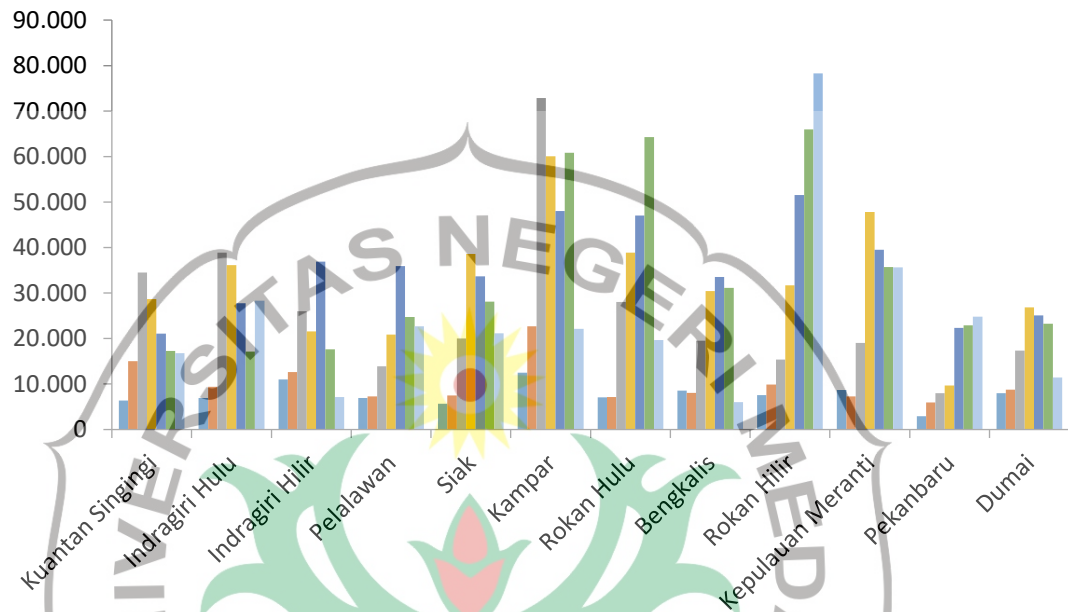
Hal ini juga sejalan dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) dan sejumlah penelitian telah menunjukkan hubungan yang kuat antara sumber daya manusia, yang mencakup pendidikan dan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Meier dan Rauch (dalam Brata, 2004) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan manusia dan berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu,

pendidikan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi pada masyarakat, memperkuat kohesi sosial dan mendorong pembangunan inklusif.

Hal tersebut mesti menjadi perhatian oleh pemerintah berkaitan dengan usaha meluaskan penduduk guna menggapai kelayakan hidup yakni bidang pendidikan. Pada perihal tersebut, pemerintah menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatannya pada alokasi belanja pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sektor publik yang penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya dijadikan sebagai prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dengan harapan berpengaruh lebih luas dalam makna pembangunan (Todaro, 2003).

THE
Character Building
UNIVERSITY



Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2024

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan kabupate/kota di Provinsi Riau dalam APBD tahun 2017-2023. Rata-rata pengeluaran pemerintah Provinsi Riau di sektor pendidikan pada kabupaten Rokan Hulu yang mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2022 sebesar 64,303 miliar menjadi 19,651 miliar pada tahun 2023, begitu pula dengan kabupaten Kampar dengan penurunan dari 60,827 miliar menjadi 22,152 miliar. Namun, sekalipun demikian alokasi anggaran pendidikan yang terendah adalah kabupaten Bengkalis yang juga menurun dari tahun 2022 sebesar 31,106 juta miliar menjadi 5,998 miliar tahun 2023 begitu pula pada kabupaten Indragiri Hilir yang turun menjadi sebesar 7,175 miliar pada tahun 2023.

Namun untuk kabupaten/kota yang memiliki prioritas tinggi yakni Kabupaten Rokan Hilir yang tiap tahunnya meningkat dengan pesat sebesar pada tahun 2022 sebesar 65,996 juta menjadi 78,312 juta pada tahun 2023. Perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Riau merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian hal ini diharapkan akan berdampak positif bagi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia cukup signifikan. Faktor-faktor ini saling terkait erat dan mempunyai dampak langsung terhadap perkembangan keseluruhan dan kesejahteraan individu dalam suatu masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia, Namun, meskipun demikian masih terdapat ketimpangan antara teori dengan fakta data yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sehingga penelitian ini dipandang sebagai suatu hal yang baru, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia beberapa Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau yang terus meningkat namun lambat dalam beberapa tahun terakhir serta masih tertinggal dari beberapa provinsi di Indonesia.
2. Masih ditemukan kesenjangan faktor laju pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu terhadap kondisi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.
3. Masih ditemukan kesenjangan faktor tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu terhadap kondisi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau, termasuk kota Pekanbaru yang memiliki nilai IPM tertinggi, namun memiliki tingkat pengangguran tinggi pula.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Fokus penelitian akan dibatasi pada Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau sebagai wilayah studi.
2. Penelitian ini akan fokus pada pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah sektor

pendidikan sebagai variabel independen terhadap indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen. Variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi indeks pembangunan manusia, seperti kemiskinan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, maupun lainnya tidak akan dimasukkan dalam analisis.

3. Data yang dipakai ialah data tahunan dalam kurun waktu 2017-2023.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau?
3. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau?
4. Apakah terdapat pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

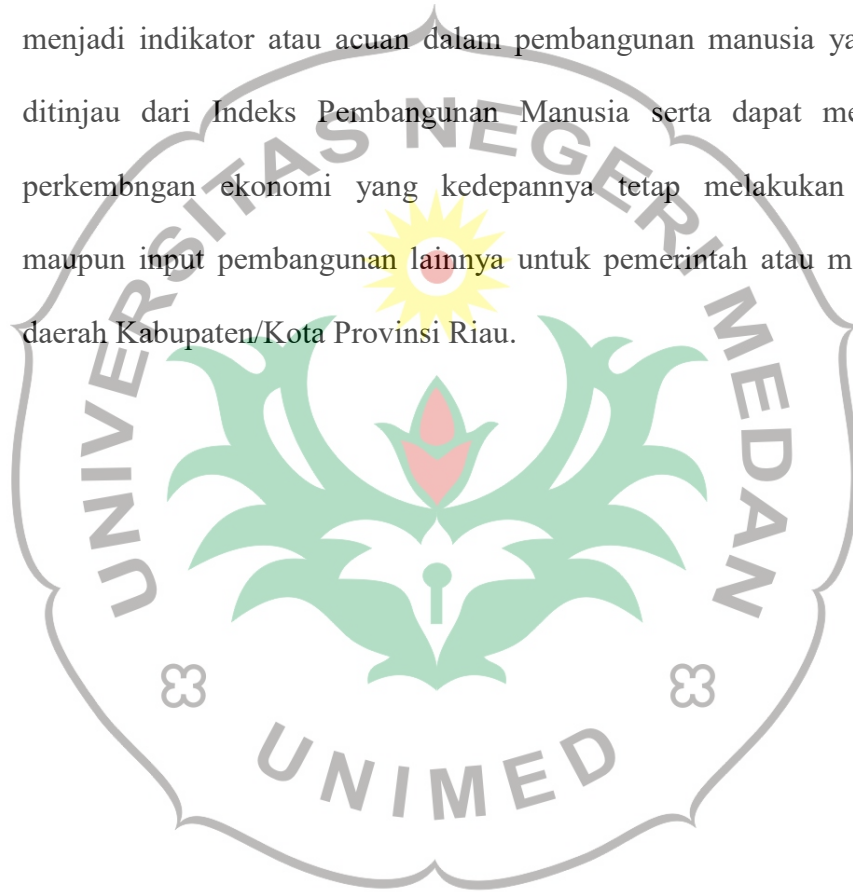
3. Untuk mengetahui bagaimana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu aspek empiris dan aspek praktis :

1. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara empiris yaitu memberikan kontribusi pada pengetahuan terhadap penelitian selanjutnya. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi sarana wawasan pengetahuan khusus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia sehingga dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perbandingan kondisi IPM pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.
2. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang masuk dalam

ranah ekonomi di kawasan Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2017-2023. Selain itu, penelitian ini diharapkan faktor-faktor tersebut dapat menjadi indikator atau acuan dalam pembangunan manusia yang dapat ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia serta dapat mendukung perkembangan ekonomi yang kedepannya tetap melakukan evaluasi maupun input pembangunan lainnya untuk pemerintah atau masyarakat daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau.



THE *Character Building*
UNIVERSITY